

ABSTRAK

Negara Indonesia telah membentuk Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menampung prinsip-prinsip atau asas-asas dan didalamnya berlandaskan Filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam bidang kekeluargaan khususnya perkawinan. Proses penyelesaian perihal kasus perkawinan ditangani oleh Pengadilan seperti dalam kasus pernikahan siri dapat di laksanakan melalui proses permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hasil penemuan kasus mengenai itsbat nikah dalam perkara putusan no 0581/pdt.G/2017/PA Ckr yang adili secara ditolak oleh Majelis Hakim membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan menjadi bahan penelitian. Penelitian ini membuat identifikasi masalah dengan membahas akibat hukum penolakan itsbat nikah terhadap hak waris anak? serta upaya yang dapat di lakukan untuk mendapatkan hak waris anak?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum dari norma hukum, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang di lakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahap kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menggabungkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku, karya ilmiah, tesis di sertai internet, dan sumber-sumber lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari penolakan status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara Negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar perkawinan. Upaya pembagian harta waris anak luar nikah dari hasil penelitian penulis dapat di jelaskan apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasarnya harta warisan anak luar nikah hanya didapatkan dari ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Namun penulis memberikan rekomendasi dari penelitian ini yang dapat dilakukan hak anak luar kawin untuk menerima harta berupa *wasiat wajibah* atau *hibah* dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup. Terhadap masalah perkawinan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan masih kurangnya pengawasan terhadap pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil analisis penulis memberikan saran harus lebih ketatnya pengawasan terhadap perkawinan yang terjadi di Indonesia agar tidak banyak terjadi perkawinan yang tidak di anggap Negara dan upaya dengan adanya ketentuan *wasiat wajibah* bisa di ketahui oleh setiap masyarakat dan di terapkan apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan anak luar nikah agar anak tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya.

ABSTRACT

Indonesia has been established Law No. 1 of 1974 concerning Marriage that accommodates principles and it is based on the Pancasila Philosophy and the 1945 Constitution which has been the guideline and applied for people to solve various problems in the family field, especially in marriage. The settlement process regarding family cases is handled by the court as in the case of illegal marriages can be carried out through the process of marriage registration in the Religious Court. The findings of the case regarding religious marriage in the case of decision No. 0581 / pdt.G / 2017 / PA Ckr which was judged that rejected by the Panel of Judges made the writer interested to analyze and becoming research material. This research makes identification of problems by discussing the legal consequences of the rejection of religious marriage against children's inheritance rights? As well as efforts that can be done to get children's inheritance rights?

This study used a normative juridical approach that focused on an analysis of statutory regulations using legal material with legal norms, legal norms and statutory regulations. The stages carried out in compiling this research with the literature study. Literature study is an activity to combine information that is relevant to the topic or problem that become the object of research. This information can be obtained from legislation, books, scientific works, thesis along with the internet, and other sources.

The results of this study indicated that the consequences arising from the rejection of marriage status of the husband and wife are not legitimate in the State, so that the husband and wife did not have the rights and obligations as husband and wife, and also the children that was born in the marriage are considered out-of-marriage children. The efforts was divided the inheritance of a child out of marriage from the results of author's research can be explained if the child did not have strong legal evidence from his biological father to get his inheritance then the child does not have the right to get the inheritance from his biological father because basically the inheritance of an external child marriage is only obtained from her biological mother and mothers' family. However, the author provided recommendations from this research that can be done the right of an out-of-wed child to receive wealth in the form of testament or bequest from his biological father while his father wants to give it to his child and while his father is still alive. Regarding marriage problems that occur in Indonesia, due to the lack of supervision of the registration of marriages. Based on the results analysis, the author suggests that supervision of marriage should be more strict that occur in Indonesia so that marriages do not occur that are not considered by the State and efforts with the existence of testament can be known by everybody and applied if something happens relating to children out of marriage, so the child gets his rights and obligations.